

# 2025

## Minggu ke-3 November (17 s.d. 23 November 2025)

# Isu Sepekan

Bidang Ekkuinbang, Komisi VI



**BADAN KEAHLIAN**  
**DPR RI**

Bridging research to parliament  
Evidence based policy making

## KESIAPAN INJOURNEY AIRPORTS DALAM MENGHADAPI LIBURAN NATARU

**Rizky Allam Zandriyan Pratama**  
Analis Legislatif Ahli Pertama  
[rizky.pratama2@dpr.go.id](mailto:rizky.pratama2@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Momen liburan Natal dan Tahun Baru setiap tahun menjadi puncak perjalanan udara di Indonesia, ditandai dengan lonjakan signifikan jumlah penumpang pesawat. Pada Nataru 2025/2026, Injourney Airports memprediksi jumlah penumpang mencapai lebih dari 9 juta orang, atau naik 3,8 persen dari tahun sebelumnya. Puncak arus keberangkatan diperkirakan terjadi pada 20–21 Desember 2025, sedangkan puncak arus balik diprediksi pada 3–4 Januari 2026. Kondisi ini menuntut kesiapan seluruh bandara yang dikelola Injourney untuk melayani masyarakat secara maksimal dan aman.

Dalam menghadapi momen tersebut, Injourney Airports memastikan kesiapan fasilitas operasi dan layanan bandar udara (bandara), baik di sisi udara maupun darat, dengan dukungan sekitar 16 ribu personel yang mencakup keamanan, pelayanan, serta kesigapan *Airport Rescue and Fire Fighting* (ARFF). Keamanan juga diperkuat oleh TNI dan Polri, sementara pelayanan ditunjang *customer service*, *digital service*, dan *golfcar assistant*. Injourney Airports memastikan kesiapan sistem teknologi informasi melalui fasilitas seperti *Airports Operation Control Center* (AOCC), *Terminal Operation Control* (TOC), dan sistem *Management Operation Based on Traffic* (MOT) yang mampu memprediksi pergerakan penumpang serta merekomendasikan kebutuhan fasilitas dan sumber daya manusia (SDM). Seluruh bandara disiapkan untuk beroperasi 24 jam sesuai kebutuhan maskapai, termasuk penyesuaian jam operasional dan optimalisasi *slot time* untuk memenuhi kebutuhan perjalanan udara masyarakat.

Selain itu posko terpadu juga disiapkan di kantor pusat, regional, dan bandara untuk memantau dan mengatasi kendala selama 18 hari yang direncanakan berlangsung pada 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026. Posko terpadu menjadi wadah kolaborasi bagi Injourney Airports, Kantor Otoritas Bandar Udara, Maskapai Penerbangan, TNI, Polri, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Airnav Indonesia, Kementerian Kesehatan dan stakeholders lainnya untuk memastikan operasional dan pelayanan bandara berjalan lancar tanpa hambatan.

Dengan persiapan ini, harapannya Injourney Airports dapat berkontribusi pada kelancaran mobilitas masyarakat sehingga memperkuat koneksi nasional. Peningkatan kapasitas dan pelayanan mendorong tumbuhnya sektor pariwisata dan ekonomi daerah, memberikan manfaat langsung bagi masyarakat serta pelaku usaha UMKM di sekitar bandara maupun daerah tujuan wisata. Selain itu, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap transportasi udara akan memperkuat citra positif BUMN sebagai pengelola bandara yang profesional dan responsif.

Namun, beberapa hal perlu menjadi perhatian oleh Injourney Airports. Lonjakan penumpang berpotensi memicu kepadatan fasilitas bandara, keterlambatan penerbangan, dan risiko gangguan keamanan. Peningkatan aktivitas juga dapat menimbulkan tekanan lingkungan, seperti polusi udara dan limbah yang harus dikelola dengan baik. Jika tidak ditangani secara optimal, kondisi tersebut dapat merugikan masyarakat dan menurunkan kualitas layanan, bahkan menimbulkan kerugian ekonomi dan menurunkan citra BUMN dan pemerintah.

## Atensi DPR

Dalam menghadapi isu tersebut, Komisi VI DPR RI melalui fungsi pengawasannya perlu mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian serius pada peningkatan kapasitas infrastruktur dan sumber daya manusia di bandara. Penguatan regulasi, alokasi anggaran untuk modernisasi bandara, serta penerapan teknologi digital dalam proses pelayanan sangat diperlukan agar bandara siap beroperasi secara optimal. Lonjakan penumpang pada momen liburan seperti Nataru perlu diimbangi dengan kesiapan maksimal bandara sehingga lonjakan tersebut tidak menimbulkan hambatan layanan.

Injourney Airports memprediksi jumlah penumpang mencapai lebih dari 9 juta pada momen Liburan Natal dan Tahun Baru 2025/2026. Dalam menghadapi momen tersebut Injourney Airports menyiapkan fasilitas, layanan, dan teknologi bandara yang didukung sekitar 16 ribu personel. Selain itu, posko terpadu dibentuk di berbagai level untuk memantau operasional selama periode tersebut. Kolaborasi lintas instansi juga dilakukan untuk memastikan layanan bandara tetap lancar. Namun, Injourney Airports perlu mewaspadai lonjakan penumpang yang dapat memicu kepadatan, keterlambatan, dan risiko keamanan, serta tekanan lingkungan seperti polusi dan limbah. Tanpa penanganan optimal, kondisi tersebut dapat merugikan masyarakat, menurunkan kualitas layanan, serta berdampak negatif pada citra BUMN dan pemerintah. Komisi VI DPR RI melalui fungsi pengawasannya perlu mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian pada peningkatan kapasitas infrastruktur dan sumber daya manusia di bandara. Penguatan regulasi, alokasi anggaran untuk modernisasi bandara, serta penerapan teknologi digital dalam proses pelayanan sangat diperlukan agar bandara dapat beroperasi secara optimal.

## Sumber

bisnis.com, 17 November 2025;  
kompas.com, 18 November 2025;  
liputan6.com, 18 November 2025;  
tempo.co, 18 November 2025.

Isu Sepekan

Koordinator Sali Susiana  
Polhukam Puteri Hikmawati  
EKKUINBANG Sony Hendra P.  
Kesra Hartini Retnaningsih



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka\_bkdprri

EDITOR

LAYOUTER

## Polhukam

Ahmad Budiman  
Prayudi  
Rachmi Suprihartanti S.  
Novianti

Devindra Ramkas O.  
Uilly Ngesti Pratiwi  
Desty Bulandari  
Yustina Sari

## EKKUINBANG

Sri Nurhayati Q.  
Rafika Sari  
Ari Mulianta Ginting  
Eka Budiyanti  
Edmira Rivani  
Hilma Meilani

Firyal Nabihah  
Ulayya Sarfina  
Yosua Pardamean S.  
Jeffrey Ivan Vincent  
Fauzan Lazuardi R.  
Anugrah Juwita Sari

## Kesra

Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola  
Yulia Indahri

Timothy Joseph S. G.  
Nur Sholikah P. S.  
Fieka Nurul Arifa

©PusakaBK2025



Bridging Research to Parliament  
Evidence Based Policy Making